

## OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL HUMAS POLRESTABES PALEMBANG DALAM MENANGKAL PENYEBARAN INFORMASI HOAKS UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Parindah<sup>1</sup>, Merrieayu Puspita Hannah<sup>2</sup>

Universitas Bina Darma<sup>1,2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

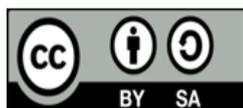
Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available Juni, 2025

Email: [indah22112004@gmail.com](mailto:indah22112004@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penyebaran informasi hoaks melalui media sosial menjadi tantangan serius yang dihadapi institusi pemerintah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Humas Polrestabes Palembang memegang peranan strategis dalam mengelola komunikasi publik guna menangkal arus disinformasi yang dapat merusak citra serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi media sosial yang dilakukan oleh Humas Polrestabes Palembang dalam menangkal penyebaran informasi hoaks, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Humas Polri, media sosial, informasi hoaks, komunikasi publik, kepercayaan masyarakat

### Abstract

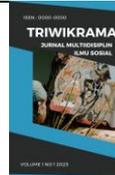
*The spread of hoax information through social media poses a serious challenge for government institutions, including the Indonesian National Police. In this context, the Public Relations Division of Polrestabes Palembang holds a strategic role in managing public communication to counteract the flow of misinformation that can damage the institution's image and reduce public trust. This study aims to analyze the strategies employed by the Public Relations Division of Polrestabes Palembang to optimize social media in combating the spread of hoaxes, as well as to evaluate its impact on increasing public trust.*

**Keywords:** Police Public Relations, social media, hoax information, public communication, public trust.

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi salah satu saluran utama dalam pertukaran informasi di ruang publik. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk berinteraksi sosial, tetapi juga menjadi sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi merusak kualitas informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, termasuk institusi kepolisian.

Hoaks merupakan bentuk disinformasi yang sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu, baik bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada awal tahun 2024, diketahui bahwa sebanyak 24,7% hoaks yang beredar di media sosial berkaitan dengan isu politik. Selain itu, kategori lainnya seperti hiburan, tindak kriminal, pemerintahan, dan ekonomi juga memberikan



kontribusi besar dalam penyebaran informasi menyesatkan. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap kestabilan sosial dan mengganggu fungsi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, keberadaan Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Humas Polrestabes Palembang, memiliki peran yang sangat penting. Humas berfungsi sebagai penghubung antara institusi kepolisian dan masyarakat serta sebagai penyedia informasi yang akurat dan terpercaya. Fungsi humas saat ini telah berkembang dari sekadar pemberi informasi menjadi pengelola opini publik yang strategis. Melalui pemanfaatan media sosial, Humas Polrestabes Palembang diharapkan mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan komunikatif, sekaligus menangkali penyebaran hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh Humas Polrestabes Palembang dalam menghadapi arus disinformasi antara lain adalah dengan menyebarkan konten edukatif yang disajikan secara menarik dan mudah dipahami, memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat secara aktif melalui media sosial. Humas juga berperan sebagai fasilitator komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, pertanyaan, maupun tanggapan secara langsung.

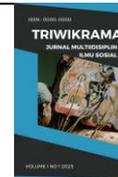
Selain itu, peningkatan kapasitas personel humas menjadi langkah penting yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Polri secara rutin mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk membekali petugas humas dengan keterampilan dalam pengelolaan komunikasi publik, penguasaan teknologi digital, serta strategi dalam menangani penyebaran informasi hoaks. Dengan penguatan ini, diharapkan para personel dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika informasi di era digital.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, optimalisasi media sosial sebagai instrumen komunikasi publik oleh Humas Polrestabes Palembang masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut antara lain mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta belum adanya strategi komunikasi yang terstruktur dan berbasis analisis data. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang menyulitkan proses diseminasi informasi yang valid dan terverifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana upaya Humas Polrestabes Palembang dalam mengoptimalkan media sosial sebagai alat untuk menangkali hoaks dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian merupakan pondasi utama dalam membangun stabilitas sosial, menciptakan ketertiban, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berbasis akuntabilitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Humas Polrestabes Palembang mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam menangkali penyebaran informasi hoaks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interaksi antara institusi kepolisian dengan masyarakat melalui media sosial secara kontekstual dan komprehensif, sehingga dapat mengetahui sejauh mana penggunaan media sosial berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polrestabes Palembang.



Dengan metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa informasi kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumentasi aktivitas media sosial Humas Polrestabes Palembang. Data tersebut kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, strategi, serta kendala dalam menangkal hoaks dan membangun citra positif institusi kepolisian di mata masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Humas Polrestabes Palembang dalam Menangkal Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial**

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang sangat cepat, Humas Polrestabes Palembang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas dan keakuratan informasi yang beredar di ruang publik, khususnya melalui media sosial. Peran ini menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya penyebaran hoaks yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Peran utama yang dijalankan oleh Humas adalah sebagai penyampai informasi resmi dari institusi Polri di tingkat wilayah. Melalui berbagai platform digital seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, Humas Polrestabes Palembang secara aktif mempublikasikan informasi terkait kegiatan kepolisian, klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar, serta himbauan-himbauan kepada masyarakat. Informasi yang akurat dan cepat disampaikan dapat mengurangi kebingungan publik dan mencegah tersebarnya berita bohong.

Selain itu, Humas juga berperan sebagai penangkal hoaks, dengan merespons berbagai isu yang tidak benar melalui klarifikasi berbasis fakta. Klarifikasi dilakukan secara cepat, baik dalam bentuk tulisan, video, maupun infografis. Respons yang sigap ini menunjukkan komitmen Polrestabes Palembang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

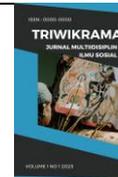
Peran lainnya adalah sebagai agen edukasi masyarakat dalam hal literasi digital. Humas Polrestabes Palembang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas dan kritis dalam menerima serta menyebarkan informasi. Konten edukatif yang dipublikasikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoaks serta pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya.

Di samping itu, Humas juga menjalankan fungsi sebagai penghubung antara institusi dan masyarakat. Melalui fitur interaktif seperti kolom komentar dan pesan langsung, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan pihak kepolisian. Hal ini menciptakan ruang dialog yang terbuka dan memperkuat hubungan emosional antara Polrestabes Palembang dan publik.

Tak kalah penting, Humas juga memiliki peran sebagai penjaga citra institusi. Dalam menghadapi isu-isu negatif yang beredar di media sosial, Humas dituntut untuk bersikap tenang dan komunikatif dalam memberikan klarifikasi tanpa memicu konflik baru. Penanganan isu yang dilakukan secara profesional dapat menjaga kredibilitas dan reputasi institusi di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, Humas Polrestabes Palembang berperan ganda: sebagai penyampai informasi, penangkal hoaks, edukator publik, jembatan komunikasi, dan pengelola citra. Peran-peran ini menunjukkan bahwa Humas tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan komunikasi yang terbuka antara polisi dan masyarakat.

Agar peran tersebut dapat dijalankan secara optimal, diperlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana teknologi pendukung, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti media, akademisi, dan komunitas masyarakat digital.



## **2. Strategi Humas Polrestabes Palembang dalam Optimalisasi Media Sosial untuk Menangkal Hoaks**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polrestabes Palembang menerapkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan media sosial sebagai alat komunikasi publik dalam menangkal penyebaran informasi hoaks. Strategi utama yang digunakan adalah penyebaran konten edukatif dan klarifikasi cepat terhadap isu-isu yang beredar. Personel Humas secara aktif memproduksi konten berupa infografis, video, dan tulisan yang mudah dipahami serta menarik perhatian masyarakat (Sari, 2022).

Selain itu, Humas Polrestabes Palembang juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat melalui kolom komentar dan fitur pesan pribadi di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Pendekatan ini memperkuat transparansi dan responsivitas institusi kepolisian, yang berdampak positif terhadap persepsi publik (Putra & Dewi, 2021). Interaksi dua arah ini sangat penting untuk membangun dialog dan menjawab pertanyaan atau keraguan masyarakat secara langsung.

Strategi pelatihan dan peningkatan kapasitas personel humas juga menjadi bagian dari upaya optimalisasi media sosial. Pelatihan ini mencakup teknik komunikasi digital dan manajemen krisis agar personel mampu menangani berita hoaks dengan cepat dan tepat (Rahman, 2023).

Selain itu, Humas Polrestabes Palembang menerapkan monitoring aktif terhadap perkembangan isu di media sosial menggunakan alat analitik dan aplikasi pendeteksi hoaks. Hal ini memungkinkan humas untuk mendeteksi potensi penyebaran informasi palsu sejak dini sehingga dapat segera memberikan klarifikasi (Wibowo, 2022). Monitoring juga berfungsi untuk mengevaluasi respons publik terhadap konten yang disebar serta mengukur efektivitas komunikasi yang dilakukan.

Penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami juga menjadi perhatian khusus agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip komunikasi efektif yang menyatakan bahwa pesan harus disampaikan secara sederhana, jelas, dan sesuai konteks audiens (Effendy, 2019).

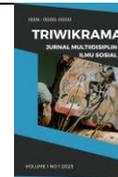
Lebih jauh, Humas Polrestabes Palembang juga menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas digital dan influencer lokal guna memperluas jangkauan penyebaran informasi yang valid. Kerja sama ini penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya berasal dari institusi resmi, tetapi juga didukung oleh tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat (Suharto, 2021).

Secara keseluruhan, strategi yang komprehensif ini menunjukkan bahwa Humas Polrestabes Palembang berupaya secara maksimal untuk memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan dialog aktif dengan masyarakat dalam rangka menanggulangi hoaks.

## **3. Efektivitas Optimalisasi Media Sosial dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, media sosial yang dikelola oleh Humas Polrestabes Palembang terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penyebaran informasi yang cepat dan akurat melalui media sosial mampu mengurangi ketidakpastian publik serta mencegah berkembangnya berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan (Nugroho, 2022).

Survei internal yang diperoleh dari Humas Polrestabes Palembang juga menunjukkan peningkatan interaksi dan umpan balik positif dari masyarakat setelah konten klarifikasi dan edukasi secara rutin dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi dan komunikasi aktif dapat memperkuat hubungan antara institusi dan masyarakat (Kurniawan, 2020).



Meski demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses atau pemahaman digital yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan diversifikasi media komunikasi agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kecepatan tanggapan humas dalam merespons isu yang beredar sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat adanya respons cepat dan solusi yang tepat dari institusi kepolisian, rasa percaya dan keyakinan terhadap informasi yang disampaikan semakin meningkat.

Pengelolaan konten yang konsisten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting. Konten yang edukatif, informatif, dan mudah dipahami membantu masyarakat membedakan antara fakta dan hoaks, sehingga menekan tingkat penyebaran informasi palsu.

Penggunaan bahasa yang komunikatif dan ramah juga menjadi kunci agar pesan dapat tersampaikan dengan efektif dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Humas Polrestabes Palembang berusaha menjaga citra positif dengan menghindari bahasa yang provokatif atau menimbulkan kontroversi.

Selain melalui media sosial, upaya membangun kepercayaan juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi lain, seperti layanan call center, situs resmi, dan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat. Pendekatan multi-saluran ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan preferensi yang beragam dalam mengakses informasi.

Dengan segala upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi media sosial oleh Humas Polrestabes Palembang cukup efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, meskipun perlu terus dikembangkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

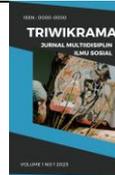
#### **4. Kendala dalam Optimalisasi Media Sosial oleh Humas Polrestabes Palembang**

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polrestabes Palembang masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Kendala-kendala tersebut bersifat teknis maupun nonteknis, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas penyampaian informasi dan upaya menangkal hoaks.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Personel yang ditugaskan untuk mengelola media sosial masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Akibatnya, tidak semua isu yang beredar di media sosial dapat ditanggapi dengan cepat dan tepat. Situasi ini menghambat kemampuan humas dalam menjaga arus informasi tetap akurat dan terpercaya (Fauzi, 2023). Selain itu, beban kerja personel yang merangkap fungsi lain juga berdampak pada kurang optimalnya manajemen media digital secara profesional.

Kedua, minimnya pelatihan teknis yang bersifat berkelanjutan juga menjadi kendala signifikan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis dan semakin canggihnya metode penyebaran hoaks, personel humas perlu memiliki keterampilan komunikasi digital yang memadai. Tanpa pelatihan yang rutin, kapasitas personel untuk mengelola media sosial dengan pendekatan strategis akan tertinggal (Handayani, 2021). Terlebih, kemampuan dalam memproduksi konten kreatif dan analisis data media sosial juga belum merata di kalangan personel.

Ketiga, belum adanya strategi komunikasi digital yang terstruktur dan terintegrasi secara menyeluruh di lingkungan Polrestabes Palembang menyebabkan efektivitas penyampaian pesan belum maksimal. Pengelolaan konten masih dilakukan secara manual dan insidental, belum berbasis kalender konten atau data analitik. Koordinasi antarbagian, seperti hubungan



masyarakat, IT, dan satuan tugas lain, juga belum optimal, sehingga terkadang menimbulkan tumpang tindih informasi dan keterlambatan respons (Sari & Putra, 2022).

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat lunak untuk desain konten, aplikasi pemantauan tren media sosial, dan akses terhadap teknologi monitoring hoaks, turut menjadi kendala. Humas Polrestabes Palembang belum sepenuhnya dilengkapi dengan alat analitik yang mampu memantau persebaran hoaks secara real-time. Hal ini menyebabkan proses klarifikasi terhadap informasi palsu tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, yang membuat mereka mudah percaya dan membagikan informasi tanpa verifikasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Humas Polrestabes Palembang dalam menyampaikan klarifikasi dan edukasi digital secara efektif. Ketika informasi yang benar tidak tersebar secara merata, maka potensi hoaks untuk menyebar akan tetap tinggi, terutama di kalangan pengguna media sosial yang tidak selektif.

Humas juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi citra institusi di tengah arus informasi negatif. Isu-isu yang berkaitan dengan kinerja kepolisian yang muncul di media sosial, meskipun bersifat lokal, dapat dengan cepat menjadi viral dan membentuk persepsi nasional apabila tidak ditangani secara tepat. Hal ini menuntut adanya manajemen isu yang tangguh dan penguasaan terhadap dinamika komunikasi digital.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Humas Polrestabes Palembang perlu melakukan penguatan kelembagaan dalam hal manajemen komunikasi publik digital. Dibutuhkan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan strategi komunikasi digital yang lebih sistematis, serta penyediaan sarana teknologi yang memadai. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan komunitas digital, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat juga penting untuk memperluas jangkauan pesan yang akurat serta meningkatkan literasi digital masyarakat secara luas.

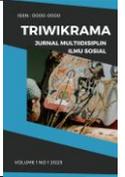
## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Humas Polrestabes Palembang telah menunjukkan upaya nyata dalam mengoptimalkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk menangkal penyebaran informasi hoaks. Melalui penyebaran konten edukatif, klarifikasi cepat terhadap isu yang menyesatkan, serta interaksi aktif dengan masyarakat di berbagai platform media sosial, Humas berperan sebagai ujung tombak institusi kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik di tengah maraknya disinformasi digital.

Strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Humas terbukti cukup efektif dalam membangun persepsi positif masyarakat. Interaksi yang terjadi di media sosial menunjukkan peningkatan keterlibatan publik dan tanggapan positif terhadap konten klarifikasi dan edukasi yang dipublikasikan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang partisipatif yang memungkinkan terjadinya dialog antara kepolisian dan masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan strategi tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang komunikasi digital, kurangnya pelatihan teknis secara berkelanjutan, serta belum optimalnya integrasi sistem komunikasi berbasis data menjadi tantangan yang cukup signifikan. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang menghambat efektivitas komunikasi publik yang dilakukan oleh Humas.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Humas Polrestabes Palembang telah menjalankan peran strategis dalam menangkal hoaks dan



meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial. Upaya ini berjalan dengan cukup efektif meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, teknologi, dan kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat. Optimalisasi media sosial oleh Humas menjadi kunci penting dalam menjaga reputasi institusi kepolisian serta mendukung terciptanya ekosistem informasi publik yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- APJII. (2024). Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Fauzi, R. (2023). Kendala dalam pengelolaan media sosial pada humas institusi pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Digital*.
- Handayani, T. (2021). Pelatihan komunikasi digital dalam menghadapi disinformasi di era media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Kurniawan, D. (2020). Transparansi dan komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. *Jurnal Komunikasi Publik*.
- Nugroho, B. (2022). Pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dalam konteks hoaks. *Jurnal Media dan Informasi*.
- Putra, A., & Dewi, S. (2021). Interaksi digital humas kepolisian dengan masyarakat: Studi kasus Polrestabes Palembang. *Jurnal Humas dan Media*.
- Rahman, S. (2023). Pelatihan komunikasi krisis untuk personel humas: Strategi menghadapi hoaks. *Jurnal Manajemen Komunikasi*.
- Sari, L. (2022). Strategi humas dalam menangkal berita bohong melalui media sosial. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*.
- Sari, L., & Putra, A. (2022). Pengelolaan konten digital dan sinergi humas kepolisian di era media sosial. *Jurnal Komunikasi Modern*.
- Situmorang, D. R. (2021). Pengaruh literasi digital terhadap kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.
- Wibowo, H. (2023). Strategi komunikasi krisis di institusi kepolisian dalam era digital. *Jurnal Komunikasi Strategis*.
- Yulianto, T. (2022). Peran media sosial dalam komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.